

MEMBENTUK GENERASI YANG BERKARAKTER (TANTANGANNYA BAGI PENDIDIKAN DI INDONESIA)

Idham Kholid

UIN Raden Intan Lampung
e-mail: idham_12@yahoo.com

Abstract: *Once the importance of characterized generation, character education, Pancasila values education and antiradicalism education are inevitable. On the other hand, the latest issue that can be considered the most potential to disrupt the unity of the Unitary Republic of Indonesia is the idea of radicalism. In order to ensure that today's generation and future will be able to maintain the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, it needs to be printed by generations that have strong character, have an appreciation of the values of Pancasila and also have antiradicalism attitude. Thus, it takes the process and the ideal vehicle to form the intended generation. In this context, the most likely process is education. Education in Indonesia should be oriented towards the development of cognitive, affective, and psychomotor aspects simultaneously.*

Keywords: *Charaterized Generation, Antiradicalism, Pancasila Values*

----- ◆ -----

PENDAHULUAN

Undangan untuk ikut bertukar pikiran dalam seminar dengan tema “Pembentukan Kepribadian Melalui Pendidikan Karakter, Nilai-nilai Pancasila dan Antiradikalisme Guna Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” saya coba pahami sebagai sebuah arena diskusi yang nantinya akan menjawab pertanyaan, misalnya, “Bagaimana menyiapkan generasi yang mampu menjaga eksistensi NKRI?” Seminar ini tampaknya juga menyorot dimensi pendidikan karakter, pendidikan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan antiradikalisme sebagai jawaban untuk menyiapkan generasi yang dicita-citakan itu.

Dalam kurun beberapa tahun terakhir, Indonesia seolah tengah disekap fenomena yang mengkhawatirkan banyak kalangan akan terkoyaknya keutuhan NKRI. Misalnya, bertunasnya pemikiran-pemikiran yang menganggap bahwa bentuk negara yang ideal bukanlah bentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila seperti Indonesia hari ini, tetapi bentuk lain yang didasarkan pada teks-teks agama, yang dipandang sebagai satu-satunya kebenaran.¹

Pola pikir seperti ini tentu saja sangat bertentangan dengan realitas Indonesia yang majemuk, yang sejak awal dibentuknya sudah terdiri dari berbagai suku dan agama. Kesadaran akan kebinekaan inilah yang mendorong para pendiri bangsa menyepakati agar negara ini didasarkan pada satu Falsafah yang mampu memayungi kepelbagaian tersebut. Falsafah Negara yang kita kenal dengan Pancasila kemudian dipandang yang paling patut mengakomodasi pluralitas pada bangsa ini.

Guna memastikan generasi hari ini dan masa yang akan datang kapabel merawat keutuhan NKRI, perlu dicetak generasi yang memiliki karakter yang kuat², memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila dan juga memiliki sikap antiradikalisme. Maka, dibutuhkan proses serta wahana yang ideal untuk membentuk generasi yang dimaksud. Dalam konteks ini, proses yang paling mungkin adalah pendidikan.

¹ Apa yang kemudian disebut sebagai paham radikalisme berawal dari pembacaan terhadap teks-teks keagamaan yang dipahami sedemikian rupa yang sarat dengan kebencian dan bermuatan politik. Walaupun di luar itu faktor sosial, politik dan ekonomi umat Islam dalam konstelasi nasional maupun global juga memicu aksi-aksi kekerasan yang merupakan implementasi dari paham radikalisme itu. Masdar Hilmy, “*Kurikulum Antiradikalisme dalam Pendidikan Pesantren dan Kaderisasi Ormas*” dalam Masdar Hilmy, *Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah*, (Malang: Madani, 2016), hal. 78

² Karakter merupakan nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Muchlas Samani dan Harianto, MS, 2011, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal.43. Pendidikan Karakter adalah satu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang baik kepada semua yang terlibat dan sebagai warga sekolah sehingga mempunyai pengetahuan, kesadaran dan tindakan dalam melaksanakan nilai-nilai tersebut. Akhmad Muhaimin Azzet, *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia* (Yogyakarta: Arruz Media, 2011) hal. 36

Ketika kita memilih pendidikan sebagai jalan untuk menciptakan generasi berkarakter, orang-orang, mungkin, terpantik untuk mulai bertanya: “Bagaimana dengan pendidikan di Indonesia? Apakah kondisi pendidikan kita saat ini sudah sangat memungkinkan membentuk generasi yang dicita-citakan itu? Apa saja tantangan yang bisa membuat cita-cita itu menjadi tidak mudah untuk dicapai? Kemudian, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Apakah pendidikan karakter, pendidikan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan antiradikalisme bisa menjadi solusi?

Pada aras ini, saya tidak akan menajamkan pembahasan tentang hal-hal terkait bagaimana menyiapkan generasi yang memiliki karakter yang mampu menjaga keutuhan NKRI, tetapi lebih ingin berbagi dan berdialog tentang tantangan-tantangan pendidikan kita dalam menyiapkan generasi yang dicita-citakan itu.

PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA

Dalam dunia pendidikan, banyak pengamat mencatat bahwa pendidikan di Indonesia saat ini tengah memikul banyak persoalan. Akibatnya, pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dari Negara-negara lain di dunia. Dari banyak kenyataan yang bisa kita lihat dan rasakan, pendidikan di Indonesia memang masih bermasalah baik dari sisi kognitif maupun afektif. Dari sisi kognitif, umpamanya, pendidikan di Indonesia belum mampu menghasilkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir. Menurut laporan PISA (*Program for International Student Assessment*) 2012, sebuah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, berhitung (matematika) dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun Indonesia berada di urutan 71 dari 72 negara yang berpartisipasi. Indonesia masih kalah jauh dari Tiongkok (1) Singapura (2) Hongkong (3), Taiwan (4) dan Korea Selatan (5).³

Menilik sisi afektif, fenomena kekerasan seksual terhadap anak seperti merebaknya kasus-kasus pemerkosaan dan pembunuhan, misalnya, kasus Yuyun (14) di Bengkulu merupakan fakta yang sama sekali tidak menggambarkan Indonesia sebagai

sebuah bangsa yang bermoral. Konon, kasus seperti yang dialami Yuyun di negeri ini hanyalah ibarat fenomena gunung es: yang nampak dan terekspose hanya segelintir kasus saja. Celakanya, yang terjadi sesungguhnya dan tidak terekspose jumlahnya sangat banyak. Maka, contoh-contoh kekerasan terhadap anak perempuan semacam ini, misalnya, merupakan indikasi kegagalan pendidikan karakter di lembaga pendidikan kita.

IDENTIFIKASI PERSOALAN

Menurut tilikan para pengamat pendidikan, problematika pendidikan di Indonesia sudah sedemikian pelik hari ini. Mulai dari pengorganisasian pendidikan yang melibatkan banyak departemen, persoalan penganggaran sampai pada polemik kepala sekolah yang tidak memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang memadai serta berbagai pekerjaan rumah lain yang belum selesai. Tak heran jika tidak mudah untuk mengidentifikasi mana hulu dan mana hilir, mana sebab dan mana akibat dan seterusnya dari permasalahan tersebut.

Persoalan yang menjadi tantangan paling serius lainnya dalam pendidikan kita bila dikaitkan dengan pembentukan karakter menurut kacamata saya adalah kondisi pendidikan kita yang masih terbelah sisi kognitif dan afektif-nya. Padahal, pendidikan kita sesungguhnya mencita-citakan terbentuknya sebuah kepribadian yang utuh baik aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Pasal 3 UU No.20 /2003 tentang SISDIKNAS, misalnya, menandakan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi, peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Melihat tujuan pendidikan yang integratif itu, pendidikan di Indonesia memang seyogianya berorientasi pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara berbarengan. Namun, alih-alih mencapai itu, kita malah kerap dihadapkan dengan kenyataannya *outcome* pendidikan yang menunjukkan kedua aspek kognitif dan afektif itu tidak berkorelasi. Anak yang cerdas di sekolah belum tentu memiliki kecerdasan yang sama di masyarakat (kecerdasan sosial dan spiritual). Anak dengan peringkat akademik tinggi sama sekali tidak sejalan dengan perilaku dan sikap sosial serta spiritual yang bersangkutan. Dengan kata lain, tidak ada jaminan

³ Data PISA mencatat dari 72 negara terakhir tahun 2015 Indonesia masuk dalam peringkat 62 dari 72 negara, sedikit meningkat dibanding tahun 2012 (peringkat 71) tetapi lebih buruk dari peringkat di tahun 2009 di mana Indonesia ada di peringkat 57. “Indonesia’s PISA results Show need to use education resource more efficiently” *Jakarta Post*, Desember 18, 2016

keberhasilan akademik seorang siswa dapat mengantarkannya menjadi pribadi yang santun, berakhlak mulia dan berbudi luhur.

Tidak berkorelasinya antara aspek kognitif dan afektif itu juga bisa dilihat ketika anak tumbuh dewasa. Tidak ada garansi ketika dewasa, mereka tidak melakukan praktik korupsi. Kita tidak bisa mengingkari bahwa negeri kita tengah dijangkiti wabah korupsi mulai hulu hingga hilir. Negara paling korup di dunia versi *Transparency Internasional*, Indonesia masuk dalam peringkat 90 dari 176 negara dengan skor 37. Di tingkat Asean, Indonesia ada di peringkat 4 setelah Malaysia, Brunei dan Singapura, yang ketiga negara ini di tingkat dunia ada di peringkat 55, 41, 7.

Menggeluti profesi apaun di negeri ini tidak ada jaminan tidak melakukan korupsi. Mulai dari PNS, politisi, militer, anggota parlemen, yudikatif bahkan rakyat biasa, semua punya peluang yang sama terjebak dalam labirin korupsi. Semua posisi di negeri ini sudah terkooptasi oleh struktur mental yang korup. Ini bukti bahwa pendidikan kita masih memungungi amanat tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam UU No.20/2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga gagal melahirkan pribadi-pribadi yang unggul di berbagai bidang.

Merenungi berbagai kenyataan itu, apa sesungguhnya yang salah dalam pendidikan kita? Pertanyaan ini tentu tidak sederhana jawabannya, tetapi kalau dari sisi afektif, menurut hemat saya dipicu, salah satunya, karena anak-anak kita belum memiliki lingkungan ideal yang memungkinkan mereka melakukan internalisasi nilai-nilai kebaikan yang akan membentuk karakter mereka. Kalau merujuk pada lingkungan yang memungkinkan terjadinya internalisasi nilai-nilai pada anak-anak kita yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat akan muncul pertanyaan susulan: "Di lingkungan mana anak-anak kita yang sudah mendapatkan lingkungan ideal?" Pertanyaan inipun tidak mudah dijawab.

Tulisan Muzaki di Jakarta Post pada April 2012 "*Cheating on Exam and Character Education*" adalah salah satu contoh yang menggambarkan bahwa lingkungan sekolah memang belum menjadi habitat ideal bagi terjadinya internalisasi nilai-nilai kejujuran. Kecurangan dalam Ujian Nasional yang melibatkan murid, guru, pejabat pendidikan menjadi contoh yang sangat sempurna tentang diabaikannya kejujuran di lingkungan sekolah. Kalau praktik-praktik ketidakjujuran dalam Ujian Nasional seperti ini dan boleh jadi juga praktik-praktik ketidakjujuran dalam bentuk yang lain terjadi di lingkungan sekolah maka

nilai-nilai ini jugalah yang akan terinternalisasi pada diri anak-anak kita.

Seberapa banyak orang tua yang masih percaya anaknya akan mendapatkan pekerjaan tanpa harus melakukan kecurangan. Boleh jadi tidak sama tingkatannya, mulai dari yang paling ekstrim yang meyakini bahwa anaknya hanya perlu ijazah dan uang. Yang lebih moderat mungkin orang tua masih berpandangan bahwa ijazah saja tidak cukup tapi pengetahuan dan keterampilan, tetapi masih menganggap itu tidak cukup karena masih harus ada uang dan koneksi. Dalam tempo bersamaan, pasti masih ada orang tua yang meyakini bahwa anaknya akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya atau akan mendapat pekerjaan apapun yang diminatinya dengan berkompetisi di pasar kerja dengan fair. Yang terakhir ini kelihatannya tidak banyak atau setidaknya tidak menggambarkan mayoritas para orang tua yang ada.

Di masyarakat, berapa banyak keberhasilan yang dibanggakan yang memang betul-betul dicapai sepenuhnya dengan kejujuran. Keberhasilan yang dibanggakan itu boleh jadi masih lebih banyak yang bersifat materi yang diperolehnya juga dengan cara-cara yang "lazim". Bagi banyak kalangan, lazim saja seorang berhasil mengumpulkan kekayaan, walaupun sangat dimengerti bahwa kekayaan itu tidak mungkin didapatkan hanya dari gaji formal yang bersangkutan.

Tentu ilustrasi di atas tidak menggambarkan seluruh kondisi lingkungan di sekolah, keluarga dan masyarakat. Boleh jadi masih ada contoh-contoh positif yang terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Boleh jadi juga satu sekolah dan sekolah lain, satu keluarga dan keluarga lain, satu lingkungan komunitas dan komunitas lain tidak selalu persis sama. Yang pasti keadaan lingkungan itu akan ikut membentuk karakter anak-anak kita.

CATATAN PENUTUP

Begitu pentingnya menyemai generasi berkarakter, maka pendidikan karakter, pendidikan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan antiradikalisme adalah keniscayaan. Tiga model pendidikan yang tersebut, secara substansif sesungguhnya sama. Ketiganya merupakan proses penanaman nilai-nilai. Persoalannya adalah apakah anak-anak kita memiliki lingkungan yang memungkinkan mereka mendapatkan internalisasi nilai-nilai tersebut? Lingkungan yang memungkinkan itu tentu adalah lingkungan di mana nilai-nilai itu menjadi praktik yang nyata pada orang-orang yang ada di lingkungan tersebut, baik di lingkungan sekolah, keluarga

maupun masyarakat.

Di sisi lain, *issue* terkini yang bisa dianggap paling potensial mengganggu keutuhan NKRI adalah paham radikalisme. Salah satu ciri ideologi radikal adalah perspektif monolitik atas pemikiran keagamaan yang kerap disertai penolakan tanpa kompromi terhadap warisan khasanah pemikiran Islam yang beragam.⁴ Karena radikalisme itu terkait dengan teks-teks agama, maka pendidikan agama di level apapun bisa menjadi potensi bagi tumbuhnya sikap antiradikalisme atau sebaliknya, tergantung bagaimana pendidikan agama itu dilaksanakan. Terlebih pendidikan agama itu bisa saja diakses secara terbuka di luar pendidikan agama formal di sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Islam dan Masyarakat UIN Jakarta menemukan bahwa potensi radikal itu ternyata ada baik pada siswa dan mahasiswa maupun guru dan dosen. Dan, tumbuhnya potensi radikal itu juga tidak lepas dari pendidikan agama formal yang mereka terima di sekolah dan universitas.⁵

Beberapa hal yang saya paparkan pada tulisan ini lebih merupakan bahan-bahan untuk didiskusikan terkait bagaimana membentuk generasi yang berkarakter yang dengan begitu dapat menjaga keutuhan NKRI. Karena, lewat pendidikan proses pembentukan karakter tampaknya mungkin dilakukan. Walhasil, saya mencoba menyampaikan sejumlah tantangan dalam pendidikan kita untuk kita perbincangkan dan tawarkan solusi-solusinya dalam seminar ini.

Wallahua'lam.

⁴ Masdar Hilmy, *op.cit.*, hal. 82

⁵ Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 1 September sampai 7 Oktober 2017, dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia melibatkan 1.522 siswa, 337 mahasiswa serta 264 guru dan 58 dosen. “*Api dalam Sekam Keberagaman Gen Z*”, survey Nasional tentang Sikap Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017